

PENGARUH FAKTOR KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS* PEMERINTAH DAERAH

Kalyana Kalam Ramadhanty¹, Faoziah Ulfah Fatmawati²

^{1,2}Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

¹kalyana21001@mail.unpad.ac.id, ²faoziah.ulfah@unpad.ac.id

Abstract

This study analyzed the influence of financial and non-financial factors in predicting financial distress among municipal and regency governments in Indonesia during the 2020-2023 period. Financial distress status was measured using the Debt Service Coverage Ratio (DSCR), with a minimum threshold of 2.5 as regulated by the government. Financial factors included the carrying value of infrastructure, solvency ratio, and liquidity ratio, while non-financial factors consisted of population size, area size, and government age. A quantitative approach with binary logistic regression was employed, using a purposive sample of 84 local governments. The results showed that infrastructure, population, area size, and government age significantly affected financial distress, while solvency and liquidity ratios were not significant. These findings suggest that territorial characteristics and physical asset values play a more dominant role in explaining fiscal stress than conventional financial ratios.

Keywords: *financial distress; local government; financial factors; non-financial factors; DSCR*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh faktor keuangan dan non-keuangan dalam memprediksi *financial distress* pada pemerintah kota/kabupaten di Indonesia selama periode 2020-2023. Status *financial distress* diukur menggunakan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dengan batas minimum 2,5 sesuai regulasi pemerintah. Faktor keuangan mencakup nilai tercatat infrastruktur, rasio solvabilitas, dan rasio likuiditas, sedangkan faktor non-keuangan meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, dan umur pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi logistik biner dan melibatkan 84 pemerintah daerah yang dipilih secara purposive. Hasil menunjukkan bahwa infrastruktur, jumlah penduduk, luas wilayah, dan umur pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, sedangkan rasio solvabilitas dan likuiditas tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa karakteristik wilayah dan nilai aset fisik lebih berperan dalam menjelaskan *financial distress* dibandingkan rasio keuangan konvensional.

Kata kunci: *financial distress; pemerintah daerah; faktor keuangan; faktor non-keuangan; DSCR*

Article history

Received: August 2025

Reviewed: August 2025

Published: August 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi tahun 1997 menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal. Melalui kebijakan ini, sebagian kewenangan pengelolaan keuangan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik. Desentralisasi memberi ruang bagi daerah untuk mengelola anggaran secara mandiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah (Putri, 2022). Namun, pelaksanaan otonomi daerah belum sepenuhnya optimal, terlihat dari kualitas pelayanan publik yang masih rendah. Data Ombudsman RI tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 40,96% kabupaten yang berada di zona hijau kualitas pelayanan, mencerminkan masih lemahnya kapasitas fiskal dan manajerial di daerah.

Salah satu persoalan utama adalah struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didominasi oleh belanja pegawai, sementara belanja modal untuk pembangunan infrastruktur cenderung minim (Republika, 2024). Realisasi belanja modal yang rendah menjadi sinyal lemahnya kemampuan daerah dalam menyediakan infrastruktur dan layanan publik, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan risiko *financial distress* (Siregar et al., 2024). Ketidakeimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kapasitas keuangan yang terbatas dapat mengarah pada kondisi *financial distress*, di mana pemerintah daerah mengalami kesulitan memenuhi kewajiban keuangannya (Sutaryo et al., 2010).

Indikasi distress fiskal dapat dilihat dari rendahnya nilai Debt Service Coverage Ratio (DSCR), yang digunakan pemerintah pusat sebagai prasyarat pemberian izin pinjaman daerah. Nilai DSCR di bawah 2,5 menunjukkan potensi kesulitan keuangan dalam memenuhi pembayaran pokok dan bunga utang (Winarna et al., 2017). Dalam konteks ini, menilai kemungkinan *financial distress* menjadi penting untuk mendorong penguatan tata kelola fiskal daerah dan mencegah penurunan kualitas layanan publik (Dewata et al., 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi *financial distress* pemerintah daerah. Penelitian oleh Jones & Walker (2007) serta Sutaryo et al. (2010) menggunakan rasio keuangan, sedangkan penelitian oleh Zakia & Setiawan (2021), Winarna et al. (2017), dan Wulandari & Arza (2020) menambahkan karakteristik pemerintah sebagai variabel independen. Namun, penelitian yang menggabungkan faktor keuangan dan non-keuangan secara simultan dalam konteks pemerintahan daerah Indonesia masih terbatas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memprediksi *financial distress* pada pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia selama periode 2020-2023. Variabel yang digunakan mencakup indikator keuangan (infrastruktur pemerintah daerah, rasio solvabilitas, dan likuiditas) serta indikator non-keuangan (jumlah penduduk, luas wilayah, dan umur pemerintahan). Penelitian ini menggunakan pendekatan logistik biner dengan indikator DSCR sebagai tolok ukur status *financial distress*.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan antara pihak pemberi mandat (principal) dan pihak pelaksana mandat (agen), di mana terdapat potensi konflik kepentingan apabila agen tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan principal (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks keuangan daerah, pemerintah pusat bertindak sebagai principal yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah (agen) untuk mengelola sumber daya publik. Ketika agen tidak mampu menjalankan kewajibannya, seperti pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel, maka dapat terjadi kegagalan dalam bentuk *financial distress*. Teori ini mendasari perlunya mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja fiskal daerah agar tetap selaras dengan kepentingan publik.

Teori Stewardship

Teori stewardship berasumsi bahwa agen (pemerintah daerah) secara alami bertindak demi kepentingan principal, bukan untuk kepentingan pribadi (Davis et al., 1997). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, teori ini memandang bahwa kepala daerah dan perangkatnya memiliki tanggung jawab moral dan etis dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, *financial distress* dapat dipandang sebagai kegagalan kolektif dalam tata kelola publik, bukan semata-mata akibat perilaku oportunistik.

Teori Kapasitas Institusional

Teori kapasitas institusional menekankan pentingnya kualitas kelembagaan dalam menentukan kinerja pemerintahan. Pemerintah daerah yang memiliki kapasitas kelembagaan tinggi termasuk sumber daya manusia, sistem akuntabilitas, dan kemampuan pengelolaan fiskal cenderung lebih mampu menjaga stabilitas fiskal dan menghindari *financial distress* (Grindle & Hilderbrand, 1995). Sebaliknya, daerah baru hasil pemekaran atau daerah dengan kapasitas rendah lebih rentan terhadap tekanan fiskal akibat lemahnya manajemen anggaran dan perencanaan pembangunan.

Financial distress

Financial distress merupakan kondisi di mana pemerintah daerah mengalami tekanan fiskal dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, baik dalam bentuk pembayaran utang, pelaksanaan belanja modal, maupun penyediaan layanan publik dasar (Sutaryo et al., 2010). Dalam konteks pemerintah daerah, kondisi ini sering kali dipicu oleh ketidakseimbangan antara pendapatan daerah dan kewajiban belanja, termasuk beban pembayaran utang yang tinggi. *Financial distress* dapat mengganggu keberlanjutan fiskal dan menurunkan kualitas pelayanan publik (Indriaty et al., 2019).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Nilai Tercatat Infrastruktur terhadap *Financial Distress*

Infrastruktur merupakan aset jangka panjang yang mencerminkan kapasitas pelayanan publik suatu daerah. Daerah dengan nilai infrastruktur yang tinggi menunjukkan tingkat investasi publik yang besar dan komitmen terhadap pembangunan jangka panjang, yang pada akhirnya dapat meningkatkan stabilitas fiskal. Winarna et al. (2017) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur berkontribusi positif terhadap kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai tercatat infrastruktur, semakin kecil kemungkinan daerah mengalami *financial distress*.

H1: Nilai tercatat infrastruktur berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*.

Pengaruh Rasio Solvabilitas terhadap *Financial Distress*

Rasio solvabilitas mengukur sejauh mana total aset dapat menutupi seluruh kewajiban jangka panjang. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar risiko ketergantungan terhadap utang, yang berpotensi meningkatkan tekanan fiskal. Menurut Waninda & Arza (2019), rasio solvabilitas yang tinggi cenderung berhubungan positif dengan kondisi distress karena menunjukkan beban utang yang besar.

H2: Rasio solvabilitas berpengaruh positif terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*.

Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap *Financial Distress*

Rasio likuiditas mengindikasikan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Pemerintah daerah dengan likuiditas yang rendah cenderung mengalami kesulitan kas, sehingga berpotensi masuk dalam kondisi *financial distress* (Wulandari & Arza, 2020). Sebaliknya, likuiditas tinggi mencerminkan stabilitas keuangan jangka pendek yang lebih baik.

H3: Rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap *Financial Distress*

Jumlah penduduk memengaruhi beban layanan publik. Daerah dengan populasi besar cenderung memiliki kebutuhan pelayanan yang tinggi, yang dapat meningkatkan pengeluaran fiskal. Meskipun populasi besar bisa menjadi potensi pendapatan daerah, dalam praktiknya banyak daerah belum mampu mengoptimalkannya (Zakia & Setiawan, 2021).

H4: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*.

Pengaruh Luas Wilayah terhadap *Financial Distress*

Luas wilayah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi biaya operasional dan distribusi pelayanan publik. Daerah yang lebih luas memerlukan biaya lebih besar untuk infrastruktur dan layanan, yang berpotensi meningkatkan tekanan anggaran. Penelitian oleh Winarna et al. (2017) menyatakan bahwa luas wilayah memiliki korelasi dengan kebutuhan belanja daerah.

H5: Luas wilayah berpengaruh positif terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*.

Pengaruh Umur Pemerintahan terhadap *Financial Distress*

Pemerintah daerah yang telah lama berdiri umumnya memiliki sistem administrasi dan kapasitas kelembagaan yang lebih baik dibandingkan daerah baru hasil pemekaran. Daerah yang lebih muda sering menghadapi kendala dalam kapasitas fiskal dan manajemen keuangan (Cheisviyanny et al., 2020). Oleh karena itu, semakin muda umur pemerintahan, semakin besar potensi *financial distress*.

H6: Umur pemerintahan berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*.

METODOLOGI

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian berbasis angka yang digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel secara objektif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan data statistik pemerintah daerah yang tersedia pada situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Portal Data Kementerian Dalam Negeri untuk periode tahun 2020-2023.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria: (1) memiliki pinjaman daerah periode 2020-2023, (2) memiliki data rasio keuangan dan karakteristik wilayah yang tersedia. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 21 pemerintah daerah sebagai sampel. Dengan periode observasi selama empat tahun, maka total data observasi dalam penelitian ini adalah 84 (21 x 4).

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis yang dilakukan meliputi statistik deskriptif, uji kelayakan model (Omnibus Test dan Hosmer and Lemeshow Test), serta analisis regresi logistik biner karena variabel dependen (*financial distress*) bersifat dikotomik (distress = 1, tidak distress = 0). Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap *financial distress*. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 25.

Operasional Variabel

Berikut disajikan operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

| Variabel | Jenis Variabel | Indikator | Satuan Ukur / Skala | Sumber |
|---------------------------------|----------------|---|--|--|
| <i>Financial distress</i> | Dependen | Debt Service Coverage Ratio (DSCR) | Dikotomi (0 = sehat, 1 = distress jika DSCR < 2,5) | Sutaryo et al. (2010); Indriaty (2018) |
| Infrastruktur Pemerintah Daerah | Independen | Nilai tercatat aset tetap (infrastruktur: jalan, irigasi, jembatan, bangunan) | Ln (Total nilai tercatat aset tetap) | Winarna et al. (2017) |
| Rasio Solvabilitas | Independen | Total kewajiban ÷ total aset | Rasio | Waninda & Arza (2019) |
| Rasio Likuiditas | Independen | Aset lancar ÷ kewajiban lancar | Rasio | (D. N. Sari, 2024) |
| Jumlah Penduduk | Independen | Jumlah total penduduk | Ln (Jumlah Penduduk) | Pranoto et al. (2022) |
| Luas Wilayah | Independen | Luas administrasi wilayah daerah | Ln (Luas Wilayah) | Cheisviyanny et al. (2020) |
| Umur Pemerintahan | Independen | Tahun pengesahan daerah hingga tahun observasi | Tahun | Wulandari & Arza (2020) |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

| | Descriptive Statistics | | | | |
|--------------------------|------------------------|---------|---------|-------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Infrastruktur Pemerintah | 84 | 27.41 | 29.87 | 28.58 | 0.50 |
| Rasio Solvabilitas | 84 | 0.006 | 0.16 | 0.05 | 0.03 |
| Rasio Likuiditas | 84 | 0.11 | 53.26 | 4.18 | 8.36 |
| Jumlah Penduduk | 84 | 10.17 | 14.21 | 12.39 | 0.98 |
| Luas Wilayah | 84 | 5.01 | 9.62 | 7.39 | 1.36 |
| Umur Pemerintahan | 84 | 12.00 | 67.00 | 43.16 | 21.75 |
| Valid N (listwise) | 84 | | | | |

Hasil menunjukkan bahwa variabel infrastruktur pemerintah daerah memiliki nilai minimum sebesar 27,41 dan maksimum 29,87 dengan rata-rata 28,58 dan standar deviasi 0,50. Rasio solvabilitas memiliki nilai minimum 0,006 dan maksimum 0,16, dengan rata-rata 0,05. Sementara itu, rasio likuiditas menunjukkan sebaran yang lebih luas, dengan nilai minimum 0,11 dan maksimum 53,26 serta rata-rata 4,18. Untuk variabel non-keuangan, jumlah penduduk (dalam log) memiliki rata-rata sebesar 12,39, sedangkan luas wilayah (dalam log) memiliki rata-rata 7,39. Umur pemerintahan berkisar antara 12 hingga 67 tahun, dengan rata-rata 43,16 tahun dan standar deviasi 21,75.

Analisis Uji Regresi Logistik Uji Keseluruhan Model

| Keterangan | -2LL |
|---|--------|
| -2Log likelihood awal (block number = 0) | 57.204 |
| -2Log likelihood akhir (block number = 1) | 35.900 |

Nilai -2LL menurun dari 57,204 (Block 0) menjadi 35,900 (Block 1), menunjukkan peningkatan kecocokan model setelah variabel independen dimasukkan. Karena nilai ini lebih kecil dari Chi-square tabel (105,267), model dinyatakan layak dan signifikan.

Uji Hosmer and Lemeshow's (Goodness of Fit Test)

| Hosmer and Lemeshow Test | | | |
|--------------------------|------------|----|-------|
| Step | Chi-square | df | Sig. |
| 1 | 10.536 | 8 | 0.229 |

Hasil uji Hosmer and Lemeshow menunjukkan nilai chi-square sebesar 10,536 dengan signifikansi 0,229 ($> 0,05$), sehingga model dinyatakan sesuai dengan data. Artinya, model regresi logistik layak digunakan untuk prediksi.

Uji Koefisien Determinasi (Nagerkelke R Square)

| Model Summary | | | |
|---------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Step | -2 Log likelihood | Cox & Snell R Square | Nagelkerke R Square |
| 1 | 35.900a | 0.224 | 0.454 |

Nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,454 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan *financial distress* sebesar 45,4%, yang tergolong dalam kategori moderat. Sisanya, sebesar 54,6%, dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Uji Wald (Parsial)

| Variables in the Equation | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|-------|----|-------|--------|
| | B | S.E. | Wald | df | Sig. | Exp(B) |
| Infrastruktur | 2.413 | 1.2 | 4.041 | 1 | 0.044 | 11.17 |
| Rasio Solvabilitas | -2.908 | 16.878 | 0.03 | 1 | 0.863 | 0.055 |
| Rasio Likuiditas | -0.432 | 0.343 | 1.592 | 1 | 0.207 | 0.649 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|--------|-------|---|-------|-------|
| Jumlah Penduduk | 1.917 | 0.843 | 5.171 | 1 | 0.023 | 6.797 |
| Luas Wilayah | 1.296 | 0.589 | 4.833 | 1 | 0.028 | 3.654 |
| Umur Pemerintah | -0.131 | 0.049 | 7.131 | 1 | 0.008 | 0.878 |
| Constant | -99.465 | 39.434 | 6.362 | 1 | 0.012 | 0 |

Berdasarkan tabel 3.6 di atas, diketahui bahwa variabel independen infrastruktur, jumlah penduduk, luas wilayah dan umur pemerintah yang memiliki nilai signifikan $< 0,05$ berarti variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kondisi *financial distress* pemerintah daerah. Sedangkan untuk variabel independen rasio solvabilitas dan rasio likuiditas memiliki nilai signifikan $>0,05$ berarti variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi *financial distress* pemerintah daerah.

Uji Omnibus Test of Model Coefficients (Simultan)

| Omnibus Tests of Model Coefficients | | | | |
|-------------------------------------|-------|------------|----|-------|
| | | Chi-square | df | Sig. |
| Step 1 | Step | 21.304 | 6 | 0.002 |
| | Block | 21.304 | 6 | 0.002 |
| | Model | 21.304 | 6 | 0.002 |

Berdasarkan hasil uji pada tabel sebelumnya, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002, yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel infrastruktur daerah, rasio solvabilitas, rasio likuiditas, jumlah penduduk, luas wilayah, dan usia pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

PEMBAHASAN

Pengaruh Infrastruktur Pemerintah Daerah terhadap *Financial Distress*

Hasil regresi menunjukkan bahwa infrastruktur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*, dengan koefisien 2,413 dan nilai signifikansi 0,044 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai infrastruktur tercatat, semakin besar potensi tekanan fiskal yang dihadapi daerah. Pengeluaran besar untuk pembangunan infrastruktur tanpa diimbangi peningkatan pendapatan atau efisiensi belanja dapat menjadi beban fiskal (Winarna et al., 2017). Dalam konteks teori agensi, keputusan belanja modal besar dapat mencerminkan konflik kepentingan antara tujuan politik jangka pendek dan kemampuan fiskal jangka panjang (Cantarelli et al., 2013). Hasil ini konsisten dengan penelitian Winarna et al. (2017), Jones & Walker (2007), serta Rahmatika (2020), yang menemukan bahwa nilai aset tetap yang besar berkontribusi pada meningkatnya risiko *financial distress*.

Pengaruh Rasio Solvabilitas terhadap *Financial Distress*

Hasil regresi menunjukkan bahwa rasio solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, dengan koefisien regresi sebesar $-2,908$ dan nilai signifikansi 0,863 ($> 0,05$). Temuan ini menolak hipotesis awal yang mengasumsikan adanya pengaruh positif. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sutaryo et al. (2010) dan Indriaty et al. (2019), yang menyatakan bahwa tingginya rasio utang tidak selalu mencerminkan kondisi fiskal yang memburuk. Dalam konteks pemerintah daerah, sebagian besar utang berasal dari pemerintah pusat dengan skema pengembalian yang lebih fleksibel. Selain itu, kewajiban pembayaran utang juga diatur ketat dalam APBD sesuai PP No. 30 Tahun 2011. Dari perspektif teori stewardship, penggunaan utang yang tepat justru menunjukkan tanggung jawab pemerintah sebagai pengelola sumber daya

publik. Selama utang dikelola secara transparan dan produktif, risiko *financial distress* dapat diminimalkan (Krah & Mertens, 2023).

Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap *Financial Distress*

Hasil regresi menunjukkan bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, dengan koefisien $-0,432$ dan signifikansi $0,207 (> 0,05)$. Artinya, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh negatif tidak terbukti secara statistik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari (2024) dan Waninda & Arza (2019), yang menunjukkan bahwa rasio likuiditas belum tentu menjadi penentu utama distress fiskal. Meskipun likuiditas penting sebagai indikator jangka pendek, pemerintah daerah tetap mendapatkan aliran dana reguler seperti DAU dan DAK, sehingga risiko keuangan jangka pendek relatif dapat ditekan. Dalam konteks teori agensi, masyarakat menilai stabilitas fiskal melalui kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun, seperti dijelaskan oleh Ghofar et al. (2023), posisi likuiditas yang rendah belum tentu mencerminkan kondisi keuangan keseluruhan karena pemerintah memiliki skema pembiayaan alternatif, termasuk pinjaman dari pusat.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap *Financial Distress*

Hasil regresi menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*, dengan koefisien sebesar $1,917$ dan signifikansi $0,023 (< 0,05)$. Artinya, semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi risiko tekanan fiskal yang dihadapi daerah, sehingga hipotesis keempat diterima. Temuan ini konsisten dengan penelitian Pradana & Sarjiyanto (2023), Elfiyana & Arza (2022), serta Sari (2024), yang menunjukkan bahwa beban pelayanan publik meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Namun, kemampuan fiskal tidak selalu mampu mengimbangi kebutuhan tersebut, terutama jika tingkat kepatuhan pajak rendah dan terjadi pemborosan anggaran Harjowiryo (2019). Dalam konteks teori agensi, masyarakat sebagai prinsipal memiliki ekspektasi atas pemenuhan layanan publik oleh pemerintah daerah sebagai agen. Ketika tuntutan pelayanan meningkat tetapi tidak diimbangi perencanaan fiskal yang efektif, hal ini mencerminkan kegagalan agen dalam menjalankan mandatnya, dan meningkatkan risiko *financial distress* (Aryani et al., 2023).

Pengaruh Luas Wilayah terhadap *Financial Distress*

Hasil regresi menunjukkan bahwa luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*, dengan koefisien sebesar $1,296$ dan signifikansi $0,028 (< 0,05)$, sehingga hipotesis kelima diterima. Artinya, semakin luas wilayah suatu daerah, semakin besar potensi terjadinya tekanan fiskal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pranoto et al. (2022), Wulandari & Arza (2020), dan Zakia & Setiawan (2021), yang menunjukkan bahwa cakupan wilayah yang besar membutuhkan anggaran lebih tinggi untuk pelayanan dan infrastruktur. Keterbatasan dana membuat pemerintah daerah harus menurunkan kualitas layanan demi pemerataan (Efriandi, 2021). Dalam perspektif teori agensi, semakin luas wilayah yang dikelola, semakin besar risiko *agency problem* yang timbul karena meningkatnya kompleksitas pengelolaan anggaran dan pelayanan publik (Adiputra et al., 2018). Hal ini dapat memperburuk kondisi keuangan daerah jika tidak diimbangi strategi fiskal yang adaptif dan efisien.

Pengaruh Umur Pemerintahan terhadap *Financial Distress*

Hasil regresi menunjukkan bahwa umur pemerintahan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*, dengan koefisien $-0,131$ dan signifikansi $0,008 (< 0,05)$. Artinya, semakin lama suatu daerah berdiri, semakin kecil kemungkinan mengalami tekanan fiskal, sehingga hipotesis keenam diterima. Temuan ini sejalan dengan penelitian M. Sari & Arza (2019) dan Rahmawati et al. (2024), yang menyatakan bahwa daerah dengan usia kelembagaan yang lebih tua cenderung memiliki sistem birokrasi yang stabil, pengalaman anggaran yang matang, dan kapasitas tata kelola yang lebih baik. Sebaliknya, daerah hasil pemekaran umumnya

menghadapi tantangan dalam membangun struktur kelembagaan dan sistem keuangan, sehingga lebih rentan terhadap *financial distress* (Indriaty et al., 2019). Dalam perspektif teori kapasitas institusional, lama berdirinya suatu instansi merupakan faktor penting dalam pembentukan sistem tata kelola yang efektif. Usia pemerintahan yang panjang mencerminkan kesiapan struktural dan administratif dalam mengelola sumber daya publik dan menghadapi tekanan fiskal (Rendhy et al., 2018).

Pengaruh Infrastruktur Pemerintah Daerah, Rasio Solvabilitas, Rasio Likuiditas, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Umur Pemerintahan terhadap *Financial Distress*

Hipotesis ketujuh menguji pengaruh simultan variabel infrastruktur, rasio solvabilitas, rasio likuiditas, jumlah penduduk, luas wilayah, dan umur pemerintahan terhadap *financial distress*. Berdasarkan hasil uji Omnibus Test, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$), yang menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun tidak semua variabel berpengaruh signifikan secara individu, kombinasi faktor keuangan dan non-keuangan secara kolektif memengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan multidimensi dalam memahami risiko *financial distress* di sektor publik.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor keuangan dan non-keuangan terhadap *financial distress* pada pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia periode 2020-2023. Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa secara simultan, variabel infrastruktur, rasio solvabilitas, rasio likuiditas, jumlah penduduk, luas wilayah, dan umur pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Secara parsial, variabel infrastruktur, jumlah penduduk, dan luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan umur pemerintahan berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, rasio solvabilitas dan rasio likuiditas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa risiko *financial distress* di pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh rasio keuangan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik demografis dan kelembagaan daerah. Oleh karena itu, perencanaan fiskal yang adaptif dan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi langkah strategis dalam mencegah tekanan keuangan di tingkat daera

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada periode 2020-2023, yang sebagian besar berada dalam masa pemulihan pasca-pandemi COVID-19. Kondisi tersebut dapat memengaruhi stabilitas keuangan daerah secara tidak normal dan berdampak pada hasil penelitian. Selain itu, belum terdapat standar konseptual dan indikator yang secara spesifik menggambarkan *financial distress* di lingkungan pemerintah daerah Indonesia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengukuran dan interpretasi variabel dependen yang digunakan. Penelitian ini juga belum membedakan antara kabupaten dan kota, padahal keduanya memiliki karakteristik administratif, beban pelayanan, dan struktur pendapatan yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil analisis apabila dianalisis secara terpisah.

DAFTAR REFERENSI

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). *Transparency of local government in Indonesia*. 3(1), 123-138. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019>
- Aryani, Y. A., Gantowati, E., Nurrahmawati, A., Arifin, T., & Sutaryo, S. (2023). *DETERMINANTS OF LOCAL GOVERNMENT PUBLIC SERVICE QUALITY: EVIDENCE FROM THE DEVELOPING ECONOMY*. 12(1), 218-229. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i1siart2>
- Asisten Ombudsman RI dan Alumni Pascasarjana Ilmu Sejarah USU. (2023). *Pelayanan Publik Kita Masih Buruk. Ombudsman RI*.
- Cantarelli, C. C., Chorus, C. G., & Cunningham, S. W. (2013). Explaining cost overruns of large-scale transportation infrastructure projects using a signalling game. *Transportmetrica A: Transport Science*, 9(3), 239-258. <https://doi.org/10.1080/18128602.2011.565817>
- Cheisviyanny, C., Arza, F. I., Agustin, H., & Fitra, H. (2020). *Financial distress in local governments in Indonesia*. In A. Solikin, Y. Hadiwibowo, B. Setiawan, A. Firmansyah, & H. D. Mulyaningsih (Eds.), *Public Sector Accountants and Quantum Leap: How Far We Can Survive in Industrial Revolution 4.0?* (pp. 53-57). <https://doi.org/10.1201/9780367822965-3>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *The Academy of Management Review*, 22(1), 20-47. <https://doi.org/10.2307/259223>
- Dewata, E., Sari, Y., Febrianti, D., & Jauhari, H. (2023). Sosialisasi Upaya Pencegahan *Financial distress* Pada Bpkad Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 1(6), 915-921. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i6.199>
- Efriandi, T. (2021). *Decentralization and the challenges of local governance in Indonesia* Efriandi, Tri. 6-12. <https://doi.org/10.33612/diss.155466640>
- Elfiyana, & Arza, F. I. (2022). The Influence of Local Government Characteristics and Financial Factors on *Financial distress* Conditions in Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(2), 425-437.
- Ghofar, A., Eryanto, D., & Lestari, T. R. (2023). *Manajemen Kas Daerah: Teori dan Praktik* (1st ed.). UB Press.
- Grindle, M. S., & Hilderbrand, M. E. (1995). Building sustainable capacity in the public sector: What can be done? *Public Administration and Development*, 15(5), 441-463. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/pad.4230150502>
- Harjowiryo, M. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Penyetoran Pajak*.
- Indriaty, N., Setiawan, D., & Pravasanti, Y. A. (2019). the Effects of Financial Ratio, Local Size and Local Status on *Financial distress*. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 3(01), 38. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v3i01.381>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305-360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Jones, S., & Walker, R. G. (2007). Explanators of local government distress. *Abacus*, 43(3), 396-418. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2007.00238.x>
- Krah, R., & Mertens, G. (2023). Financial transparency, trust and willingness to pay in local governments of sub-Saharan Africa. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 35(6), 100-120. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-06-2022-0110>
- Pradana, I., & Sarjiyanto, S. (2023). *Financial distress* Ditinjau Dari Rasio Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(5), 2477-1783.
- Pranoto, F. C., Hastoro, H. A., & Nurwiyanta, N. (2022). Determinan *Financial distress* Pemerintah Daerah. *Seminar Nasional Hasil Riset*, 7-14.

- Putri, A. R. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Dalam Otonomi Daerah Menjadi Salah Satu Parameter Good Governance. *Jurisprudence Commons, Law and Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(December), 23.
- Rahmatika, H. F. (2020). *Relevansi Informasi Laporan Keuangan Terhadap Financial distress Pemerintah Daerah di Indonesia*. 53(1), 1-9.
- Rahmawati, Purnaweni, H., Warsono, H., & Yuniningsih, T. (2024). *The Assessment Maturity Organization Of Local Government: Evidence From Serang City, Banten*. 13, 210-217.
- Rendhy, Hadady, H., & Suwito. (2018). *The Influence of the Age of Local Government on the Characteristics of Local Governments on the Financial Performance of Local Governments in North Maluku Province*. 100-106.
- Ridayati, W. (2024). Menakar Kinerja Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Republika.Id*.
- Sari, D. N. (2024). *Financial distress Di Pemerintah Provinsi Di Indonesia*. 19(2), 243-266.
- Sari, M., & Arza, F. I. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi *Financial distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017. *Wahana Riset Akuntansi*, 7(1), 1425. <https://doi.org/10.24036/wra.v7i1.104566>
- Siregar, A. R. S., Lubis, N. H., Isfa, F., & Muzayyana. (2024). Pentingnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 5(1), 51-64. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v5i1.3424>
- Sutaryo, Sutopo, B., & Setiawan, D. (2010). *Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan Terkait Financial distress Pemerintah Daerah*. 1-31.
- Waninda, W., & Arza, F. I. (2019). Relevansi Informasi Laporan Keuangan Accrual Basis: Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Status *Financial distress* Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Se- Indonesia Periode 2015-2017. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 795-813. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.111>
- Winarna, J., Widagdo, A. K., & Setiawan, D. (2017). *Financial distress of local government: A study on local government characteristics, infrastructure, and financial condition*. *Global Business and Finance Review*, 22(2), 34-47. <https://doi.org/10.17549/gbfr.2017.22.2.34>
- Wulandari, Y., & Arza, F. I. (2020). Pengaruh Faktor Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap *Financial distress*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3160-3178. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.276>
- Zakia, R., & Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap *Financial distress* (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 653-671. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.387>